

EVALUASI PROGRAM KUBE DAN BANSOS PEMKOT KUPANG: KETIKA BANTUAN EKONOMI TAK MENYENTUH KEMANDIRIAN JANGKA PANJANG

Abul Reza As Syahid¹, Aprilia Stefania Berek², Egenius Kristoforus L. Payon³, Julius C. Decaprio⁴, Goreci I. R. Johan⁵, Lasarus Jehamat⁶

¹²³⁴⁵⁶ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2026

Revised Januari, 2026

Accepted Januari, 2026

Available Januari, 2026

rezaatang1@gmail.com,
apriliaberek7@gmail.com,
christoforuspayon@gmail.com,
carldecaprio@gmail.com,
indrarahayujohan@gmail.com,
lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu
Bangsa Institute

ABSTRAK

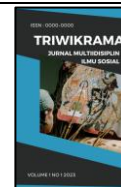
Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, masih menjadi persoalan sosial-ekonomi yang signifikan meskipun berbagai program bantuan telah dijalankan pemerintah. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Bantuan Sosial (Bansos) dirancang sebagai strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan usaha produktif masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program KUBE dan Bansos serta kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi penerima manfaat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan analisis data sekunder yang bersumber dari laporan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua program efektif dalam mengurangi beban ekonomi jangka pendek, dampaknya terhadap kemandirian ekonomi jangka panjang masih terbatas. Kendala utama meliputi rendahnya kapasitas manajerial penerima, lemahnya pendampingan, keterbatasan akses pasar dan permodalan, serta permasalahan validitas data. Dengan menggunakan perspektif Teori Ketergantungan Andre Gunder Frank, penelitian ini menegaskan perlunya reorientasi kebijakan menuju pendekatan pemberdayaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kata kunci: KUBE, Bantuan Sosial, Kemiskinan, Kemandirian Ekonomi

ABSTRACT

Poverty in East Nusa Tenggara Province, particularly in Kupang City, remains a significant socio-economic challenge despite the implementation of various government assistance programs. The Joint Business Group (Kelompok Usaha Bersama/KUBE) and Social Assistance (Bansos) programs were designed as poverty alleviation strategies through the fulfillment of basic needs and the development of productive economic activities among low-income communities. This study aims to analyze the implementation of the KUBE and Bansos programs and their contribution to the economic self-reliance of beneficiaries. A descriptive approach was employed using secondary data analysis derived from reports of the Social Affairs Office and the Ministry of Social Affairs in 2025. The findings indicate that although both programs are effective in reducing short-term economic burdens, their impact on long-term economic independence remains limited. Key constraints include low managerial capacity among beneficiaries, weak program mentoring, limited access to markets and follow-up capital, and issues related to data validity. Drawing on Andre Gunder Frank's Dependency Theory, this study highlights the need for policy reorientation toward a more integrated and sustainable empowerment-based approach.

Keywords: KUBE, social assistance, poverty, economic self-reliance



1. PENDAHULUAN

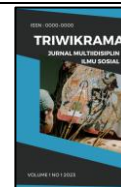
Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup banyak di Indonesia. Kemiskinan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menjadi polemik dikarenakan angka kemiskinan yang cukup tinggi akibat banyaknya proporsi masyarakat miskin serta rendahnya percepatan dan perkembangan ekonomi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), Jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.141,11 juta penduduk pada Maret 2023. Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak bersebelahan dengan Kota Kupang. Angka kemiskinan mencapai 90.230 jiwa yang mana berada di urutan ketiga setelah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Sumba Barat Daya. Jika disurvei langsung hampir di setiap sudut Kabupaten Kupang terdapat masyarakat miskin.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. KUBE dibentuk dengan tujuan mengentaskan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat miskin berdasarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sebelum adanya program Kelompok Usaha Bersama, masyarakat Kabupaten Kupang memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Terdapat sebagian yang memang memiliki lahan sendiri dan ada yang hanya sebagai buruh mengikuti orang lain. Dari akar permasalahan mengenai kemiskinan akhirnya pemerintah memiliki kebijakan dan program baru yang dinilai mampu mengentaskan angka kemiskinan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan fakir miskin, tujuan pemberian UEP kepada Kelompok Usaha Bersama ini guna penguatan kapasitas fakir miskin untuk meningkatkan pendapatan serta kemampuan usahanya yang hasilnya bisa mencukupi kebutuhan yang mandiri. Kelompok Usaha Bersama ini beranggotakan 5-20 kepala keluarga yang berasal dari kalangan masyarakat miskin. Bantuan sosial yang diberikan UEP kepada KUBE adalah uang dengan nominal minimal Rp.10.000.000,00 kepada setiap kelompok. Program ini dimanfaatkan guna menunjang produktivitas yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama masyarakat. Program KUBE yang berjalan di Kabupaten Kupang memiliki kelompok sebanyak 34 kelompok yang terdiri dari 1 kelompok penerima bantuan sapi, 1 kelompok penerima ternak kambing dan 32 kelompok penerima ternak babi. Program KUBE ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan perubahan kepada masyarakat miskin.

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan sosial (Bansos) yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Kupang pada dasarnya merupakan upaya strategis untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, kedua program ini tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, tetapi juga sebagai pendorong terbentuknya kemandirian ekonomi melalui penguatan usaha produktif di tingkat rumah tangga maupun kelompok.

Namun, realitas pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa dampak KUBE dan Bansos belum sepenuhnya menyentuh dimensi kemandirian jangka panjang. Banyak kelompok KUBE tidak berjalan secara optimal akibat lemahnya pendampingan, minimnya kapasitas manajerial, serta ketidaksesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan dan potensi penerima. Di sisi lain, pola penyaluran Bansos yang lebih bersifat karitatif sering kali tidak mempertimbangkan latar belakang dan kondisi riil penerima, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat.



Lebih jauh, keberlanjutan program juga menghadapi tantangan serius karena bantuan yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi justru berpotensi menciptakan ketergantungan. Pada sebagian masyarakat, Bansos tidak lagi dipahami sebagai bantuan sementara untuk memperkuat daya tahan ekonomi, tetapi menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan harian. Kondisi ini meninabobokan masyarakat dan menghambat terbentuknya motivasi untuk mandiri serta mengembangkan usaha produktif.

Dengan demikian, meskipun KUBE dan Bansos memiliki tujuan yang mulia, implementasinya belum sepenuhnya mampu mendorong transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Program ini membutuhkan perbaikan dari aspek perencanaan, pendampingan, ketepatan sasaran, serta orientasi pemberdayaan agar benar-benar dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin dalam jangka panjang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data sekunder dari laporan resmi Dinas Sosial Kota Kupang dan Kementerian Sosial tahun 2025. Data dianalisis untuk mendeskripsikan pelaksanaan program dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat keberhasilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

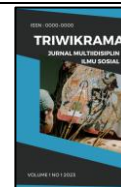
Hasil Penelitian

Wilayah Penerima Bansos Dan Data Penerima Di Tahun 2025 Kota Kupang

Kecamatan penerima bansos di Kota Kupang meliputi beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kota Lama, Alak, Oebobo, dan lainnya yang memiliki kelurahan dengan penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) atau BLT. Contohnya Kelurahan Nefonaek di Kecamatan Kota Lama menerima BLT, dan Kecamatan Alak terdapat kelurahan yang menerima bansos dengan jumlah ribuan kepala keluarga. Penerima bansos tersebar di enam kecamatan dan 51 kelurahan di Kota Kupang dengan total sekitar 14.040 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan sosial (Bansos) oleh Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2025 dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Program KUBE dibentuk dengan membentuk kelompok usaha yang terdiri dari sekitar 10 anggota keluarga miskin yang berusia produktif dan berdomisili berdekatan. Setiap KUBE mendapatkan bantuan dana sekitar Rp10 juta yang digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha produktif seperti ternak, kerajinan, atau usaha mikro lainnya. Bantuan ini diberikan dengan syarat anggota KUBE terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mengikuti bimbingan teknis serta pendampingan dari Dinas Sosial agar pengelolaan usaha berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, seluruh proses pelaksanaan KUBE dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi yang ketat serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (Juknis KUBE Perkotaan, 2025).

Untuk program bansos, Pemerintah Kota Kupang menyalurkan bantuan sosial kepada lebih dari 14.000 keluarga penerima manfaat dengan nilai total bantuan mencapai lebih dari Rp150 miliar. Bansos ini mencakup bantuan konsumtif berupa sembako, Kartu Indonesia Sehat (KIS) gratis, dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan sejak Januari 2025 secara bertahap. Syarat penerima bansos adalah keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DTSEN). Selain menyalurkan bansos, Pemkot Kupang bersinergi dengan Kementerian Sosial dan instansi terkait untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan



mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut. Program bansos juga dilengkapi dengan akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat yang dirancang untuk membuka peluang pendidikan bagi anak-anak keluarga tidak mampu (AntaraNews, 2025).

Dalam hal mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang, program KUBE memberikan pondasi bagi penerima bantuan untuk mengembangkan usaha secara bersama-sama sehingga potensi peningkatan pendapatan lebih optimal. Namun, keberhasilan kemandirian ini sangat bergantung pada faktor pembinaan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas pengelolaan usaha, dan pendampingan intensif agar tidak muncul ketergantungan hanya pada bantuan tanpa adanya keberlanjutan usaha. Faktor utama yang menyebabkan program KUBE dan Bansos belum mampu sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat antara lain keterbatasan keterampilan kewirausahaan penerima bantuan, kurangnya akses pasar dan modal lanjutan, serta kondisi sosial ekonomi lingkungan yang belum mendukung usaha berkembang. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan KUBE harus meliputi pelatihan, pendampingan bisnis, penguatan jaringan pemasaran, serta pengawasan agar bantuan dapat benar-benar menjadi modal kerja dan bukan sekadar konsumsi semata (Kupang Tribun News, 2023).

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Kupang melaksanakan program Bantuan Sosial (Bansos) dengan kuota sebanyak lebih dari 14.000 keluarga penerima manfaat (KPM). Nilai bansos yang disalurkan lebih dari Rp150 miliar, yang diberikan secara bertahap sejak Januari 2025. Program bansos ini meliputi bantuan berupa sembako, Kartu Indonesia Sehat (KIS) gratis, dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang ditujukan untuk keluarga miskin dengan sasaran desil 1-5 untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Kupang.

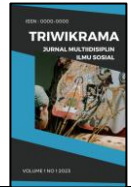
Pelaksanaan Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Dan Bantuan Sosial (Bansos) Oleh Pemerintah Kota Kupang Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima.

Menjual Pelaksanaan program KUBE di Kabupaten Kupang, yang juga berlaku untuk Kota Kupang, berfokus pada pemberdayaan komunitas miskin melalui pembentukan kelompok usaha bersama yang menerima bantuan ternak seperti babi, sapi, dan kambing. Tujuan program ini adalah meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan anggota kelompok melalui penggunaan modal hewan ternak, serta memberikan informasi tentang cara memanfaatkan program ini untuk jangka panjang. Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan informasi dan pengelolaan, pelaksanaan program KUBE berjalan cukup lancar berkat koordinasi dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Di sisi lain, pelaksanaan bantuan sosial (Bansos) oleh Pemerintah Kota Kupang mencakup berbagai jenis bantuan sosial yang diberikan kepada anggota keluarga yang menerima manfaat, seperti paket sembako, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Bansos ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan memperkuat pertumbuhan ekonomi regional, terutama bagi penduduk yang terdampak inflasi dan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kota Kupang juga bekerja sama erat dengan Kementerian Sosial untuk memastikan penyaluran Bansos tepat sasaran dan berkelanjutan.

Secara umum, implementasi Program KUBE dan program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota Kupang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan komunitas penerima manfaat melalui penerapan strategi kelompok pemberdayaan yang terstruktur dan distribusi bantuan sosial. Namun, masih terdapat tantangan seperti kebutuhan akan evaluasi program dan pengelolaan keterbatasan penerima manfaat.

Sejauh Mana Program KUBE Dan Bansos Mampu Mendorong Kemandirian Ekonomi Jangka Panjang Bagi Penerima Bantuan



Program KUBE dan Bansos di Kota Kupang belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang bagi penerima bantuan. Meskipun kedua program ini memberikan dampak positif dalam mengurangi tekanan ekonomi jangka pendek, namun kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi masih terbatas. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kontribusi Program KUBE terhadap Kemandirian Ekonomi

KUBE pada dasarnya dirancang sebagai program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan menciptakan kemandirian kelompok melalui usaha bersama. Dalam praktiknya, program ini telah memberikan modal awal berupa ternak atau usaha kecil, meningkatkan partisipasi kelompok aktivitas ekonomi, dan menggerakkan solidaritas di tingkat komunitas. Namun, dampaknya terhadap kemandirian belum signifikan karena sebagian besar kelompok masih berada pada tahap bertahan (survival level) dan belum berkembang menjadi usaha produktif yang berkelanjutan. Banyak kelompok belum mampu menghasilkan keuntungan stabil yang bisa mengangkat mereka keluar dari kemiskinan struktural. Dengan demikian, kemampuan KUBE mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang masih parsial dan belum optimal.

b. Kontribusi Program Bansos terhadap Kemandirian Ekonomi

Berbeda dengan KUBE, Bansos seperti KIS, PKH, dan sembako murah merupakan bentuk perlindungan sosial, bukan pemberdayaan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan menjamin kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, pangan). Program ini berhasil mencegah masyarakat jatuh pada kemiskinan yang lebih parah, tetapi tidak dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, penerima bansos sering kali tetap berada dalam kondisi ketergantungan dan tidak mengalami peningkatan kapasitas produktif.

c. Faktor-faktor yang Menyebabkan Program KUBE dan Bansos belum Mendorong Kemandirian Jangka Panjang

Ada beberapa faktor utama yang menghambat tercapainya kemandirian ekonomi:

1) Keterbatasan Kapasitas SDM Penerima Bantuan

Banyak kelompok penerima KUBE tidak memiliki keterampilan manajemen usaha, kurang pengetahuan tentang pemeliharaan ternak, dan tidak melakukan pencatatan administrasi atau pembagian keuntungan secara jelas.

2) Pendampingan yang Belum Optimal

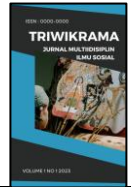
Pendamping sosial jumlahnya terbatas dan tidak mampu mengawasi semua kelompok secara insentif. Minimnya pendampingan menyebabkan permasalahan usaha yang tidak terdeteksi, kelompok hilang arah dalam pengelolaan usaha, dan tidak ada evaluasi yang terstruktur.

3) Ketergantungan Penerima terhadap Bantuan

Pada program Bansos, bantuan diterima secara rutin sehingga menimbulkan ketidakaktifan masyarakat dalam mencari penghasilan alternatif, minimnya motivasi untuk mengikuti program pemberdayaan seperti KUBE, dan pola pikir ketergantungan.

4) Masalah Validitas dan Pemutakhiran Data

Data penerima Bansos yang tidak akurat menyebabkan rumah tangga miskin yang potensi untuk diberdayakan tidak masuk program, sebaliknya warga yang masih mampu malah menerima bantuan.



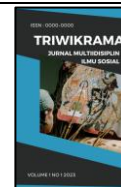
Pembahasan

Teori Ketergantungan dari Andre Gunder Frank (1966-1967). Andre Gunder Frank adalah tokoh utama yang mempopulerkan Teori Ketergantungan melalui karyanya yang sangat berpengaruh berjudul “The Development of Underdevelopment” (1966) dan tulisan-tulisannya pada tahun 1967. Frank berpendapat bahwa keterbelakangan suatu negara, wilayah, atau kelompok masyarakat bukan disebabkan oleh faktor internal, tetapi merupakan hasil dari hubungan ketergantungan yang tidak seimbang dengan pihak lain yang lebih dominan.

Menurut Frank, dunia terbagi menjadi dua kategori besar. Pertama, Center (pusat) adalah negara atau kelompok yang maju dan dominan. Kedua, Periphery (pinggiran) adalah negara atau kelompok yang terbelakang dan bergantung. Ia menjelaskan bahwa negara-negara periphery tidak berkembang karena menjadi penyedia bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar konsumsi bagi negara-negara center. Sebaliknya, negara center menjadi kaya dan maju karena terus mengeksploitasi periphery. Dengan demikian, periphery tidak pernah memiliki kesempatan untuk membangun struktur ekonomi yang mandiri, sebab seluruh proses ekonomi mereka diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar. Dalam teorinya, Frank memperkenalkan konsep “the development of underdevelopment”, yaitu gagasan bahwa kemiskinan atau keterbelakangan bukan kondisi alami atau bawaan, tetapi merupakan hasil dari proses sejarah eksploitasi yang sistematis. Artinya, perkembangan negara maju justru menghasilkan keterbelakangan negara miskin. Semakin negara periphery terintegrasi dengan sistem ekonomi negara center, semakin kuat ketergantungannya dan semakin sulit keluar dari kemiskinan struktural. Frank menegaskan bahwa ketergantungan ini tidak hanya terjadi antara negara maju dan negara berkembang, tetapi juga terjadi di dalam negara itu sendiri: daerah perkotaan menjadi “center kecil” yang mengeksploitasi wilayah pedesaan sebagai “periphery kecil”. Relasi tersebut menciptakan struktur sosial yang timpang, di mana kelompok elite lokal menjadi perpanjangan tangan kekuatan center, sementara masyarakat bawah tetap terperangkap dalam kemiskinan (Frank, 1966).

Teori Ketergantungan Andre Gunder Frank menjelaskan bahwa kondisi keterbelakangan atau ketidakmampuan suatu kelompok untuk berkembang merupakan akibat dari hubungan ketergantungan yang tidak seimbang dengan pihak yang lebih dominan. Dalam konteks evaluasi Program KUBE dan Bansos Pemkot Kupang, teori ini memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami mengapa bantuan ekonomi yang diberikan pemerintah belum mampu menciptakan kemandirian jangka panjang. Menurut Frank, kelompok “periphery” selalu berada dalam posisi pasif karena hanya menerima sumber daya dari “center”, tanpa memiliki kendali terhadap proses pembangunan atau keputusan ekonomi. Pola ini terlihat dalam program Bansos dan sebagian program KUBE di Kota Kupang, di mana masyarakat miskin menjadi penerima bantuan tanpa mendapatkan penguatan kapasitas yang memadai. Bantuan yang diberikan cenderung bersifat konsumtif dan karitatif, sehingga masyarakat bergantung pada bantuan pemerintah sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini mencerminkan apa yang disebut Frank sebagai development of underdevelopment, yaitu proses di mana bantuan justru melestarikan kondisi keterbelakangan.

Dalam program Bansos, penyaluran bantuan sembako, PKH, atau KIS dilakukan secara rutin tanpa adanya pengembangan keterampilan atau kapasitas ekonomi penerima. Ketergantungan ini membuat masyarakat miskin tidak terdorong untuk mengembangkan kemampuan produktif, sehingga mereka tetap berada dalam struktur ekonomi yang lemah dan sulit keluar dari kemiskinan. Selaras dengan teori Frank, kondisi ini memperlihatkan bahwa ketika pihak penerima hanya berperan sebagai konsumen bantuan, mereka akan tetap berada dalam siklus ketergantungan dan tidak mampu mencapai kemandirian. Sementara itu, Program KUBE yang seharusnya berfungsi sebagai program pemberdayaan juga banyak menghadapi kendala. Minimnya



pendampingan, lemahnya manajemen kelompok, dan kurangnya pelatihan keterampilan menyebabkan bantuan modal yang diberikan tidak berkembang menjadi usaha produktif yang berkelanjutan. Secara teoretis, hal ini juga sesuai dengan pandangan Frank bahwa struktur ketergantungan tidak hanya bersifat global, tetapi juga terjadi di tingkat lokal. Pemerintah daerah—sebagai “center lokal”—memposisikan masyarakat miskin sebagai “periphery lokal” yang hanya menerima modal, tetapi tidak diberdayakan untuk mengontrol, mengelola, dan mengembangkan usaha secara mandiri. Akibatnya, usaha KUBE tetap berada pada tahap bertahan dan tidak mampu menciptakan pendapatan yang stabil.

Dengan demikian, menggunakan perspektif Teori Ketergantungan, ketidakmampuan program KUBE dan Bansos dalam menciptakan kemandirian jangka panjang dapat dipahami sebagai akibat dari pola hubungan yang menempatkan masyarakat miskin sebagai penerima pasif bantuan tanpa penguatan kapasitas internal. Bantuan yang diberikan tidak diikuti dengan transfer kontrol, transfer pengetahuan, atau pengembangan kemampuan produktif, sehingga masyarakat tetap berada dalam struktur ketergantungan yang sama dan tidak mampu bangkit menjadi kelompok yang mandiri secara ekonomi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

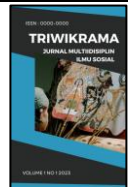
Simpulan

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Bantuan Sosial (Bansos) yang dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang telah memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga miskin pada jangka pendek. Namun, implementasi kedua program tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang. Program KUBE masih menghadapi kendala berupa rendahnya kapasitas sumber daya manusia penerima, terbatasnya pendampingan, lemahnya manajemen usaha, serta keterbatasan akses pasar dan permodalan. Sementara itu, program Bansos yang bersifat karitatif cenderung belum mendukung peningkatan kapasitas produktif dan berpotensi menumbuhkan ketergantungan.

Untuk meningkatkan efektivitas program, pemerintah perlu memperkuat pelatihan dan pendampingan bagi penerima manfaat, memperbaiki akurasi data sasaran, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan. Selain itu, integrasi Bansos dengan program pemberdayaan ekonomi, perluasan akses pasar dan kemitraan usaha bagi kelompok KUBE, serta penyesuaian jenis bantuan dengan potensi ekonomi lokal menjadi langkah strategis agar program bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Saran

Pemerintah Kota Kupang perlu memperkuat pendekatan pemberdayaan dalam pelaksanaan Program KUBE dan Bantuan Sosial dengan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia penerima manfaat melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha yang berkelanjutan. Pendampingan dan monitoring program juga perlu ditingkatkan secara konsisten agar pelaksanaan usaha kelompok dapat berjalan efektif dan adaptif terhadap tantangan pasar. Selain itu, pembaruan dan validasi data penerima bantuan harus dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan sasaran dan menghindari ketimpangan distribusi bantuan. Integrasi program Bansos dengan skema pemberdayaan ekonomi produktif menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan konsumtif. Pemerintah juga disarankan memperluas akses pasar, kemitraan usaha, serta permodalan bagi kelompok KUBE dengan



menyesuaikan jenis bantuan pada potensi ekonomi lokal agar tercipta kemandirian dan keberlanjutan ekonomi masyarakat miskin.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Maret 2023*. <https://ntt.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/1152/persentase-penduduk-miskin-maret-2023-turun-menjadi-19-96-persen.html>
- Bataona, Y. B. (2025). Pemkot Kupang ajak warga segera mendaftar kuota bansos tambahan. *ANTARA News*. <https://kupang.antaranews.com/berita/171061/pemkot-kupang-ajak-warga-segera-mendaftar-kuota-bansos-tambahan>
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Petunjuk teknis (juknis) KUBE perkotaan tahun 2025*. <https://id.scribd.com/document/884811875/JUKNIS-KUBE-PERKOTAAN-2025>
- Frank, A. G. (1966). The development of underdevelopment. *Monthly Review*, 18(4), 17-31.
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and underdevelopment in Latin America: Historical studies of Chile and Brazil*. Monthly Review Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang usaha ekonomi produktif kelompok usaha bersama (KUBE)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129477/permensos-no-2-tahun-2019>
- Kupangmetro. (2025, November 8). Bantuan sosial merupakan wujud kehadiran Pemerintah Kota Kupang untuk kesejahteraan masyarakat. <https://kupangmetro.com>
- Mardiana, S. S. (2025). Implementasi program pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) dalam rangka penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Merdeka. (2025). Kupang dapat tambahan bansos Rp150 miliar: 14 ribu warga NTT bakal terima bantuan sosial. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kupang-dapat-tambahan-bansos-rp150-miliar-14-ribu-jiwa-warga-ntt-bakal-terima-bantuan-sosial-428953-mvk.html?page=4>
- Ningsih, D. W. (2024). Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program kelompok usaha bersama (KUBE). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Oktavia, V. (2024). *Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kabupaten Kupang* [Skripsi/tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
- Tribun News Kupang. (2023, September 20). Warga Kota Kupang terima bantuan sosial dan dana KUBE. <https://kupang.tribunnews.com/2023/09/20/warga-kota-kupang-terima-bansos-dan-dana-kube>
- Usman, U. (2019). Efektivitas program kelompok usaha bersama (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan petani jagung di Desa Labangka. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Wulpiah. (2019). Implikasi pelaksanaan program KUBE terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*.